

**PERSEPSI STAKEHOLDERS  
TERHADAP PELUANG PENGEMBANGAN  
KERJASAMA ANTAR DESA  
DI KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN  
STUDI KASUS: KABUPATEN SLEMAN**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Oleh:

**WILDHA BADRUS SUBKHI  
NIM. 21040117410034**



**FAKULTAS TEKNIK  
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2019**

**PERSEPSI STAKEHOLDERS  
TERHADAP PELUANG PENGEMBANGAN  
KERJASAMA ANTAR DESA  
DI KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN  
STUDI KASUS: KABUPATEN SLEMAN**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Oleh:

**Wildha Badrus Subkhi**  
NIM. 21040117410034

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 27 Februari 2019

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

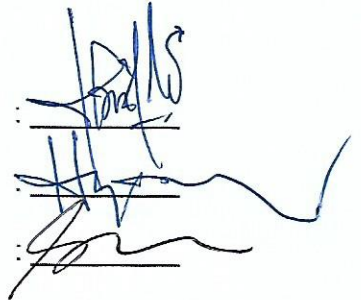
Semarang, 27 Februari 2019

Tim Penguji

Dr. Fadjar Hari Mardiansjah, ST, MT, MDP – Pembimbing

Dr. Ir. Hadi Wahyono, MA – Penguji 1

Maya Damayanti, ST, MA, PhD – Penguji 2



Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro



  
Dr. sc. agr. Iwan Rudiarto, S.T., M.Sc.

## ABSTRAK

Kota-kota kecil cepat tumbuh dengan populasi kurang dari 500.000 jiwa banyak tumbuh di negara berkembang. Di Indonesia perkembangan kota-kota kecil cepat tumbuh banyak muncul di kabupaten-kabupaten. Perkembangan kota-kota kecil/kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh menjadi beban bagi pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten masih belum mampu mengelola kawasan perkotaan yang cepat tumbuh. Ketidakmampuan pemerintah kabupaten mengelola kawasan perkotaan disebabkan oleh dua hal. Pertama, kapasitas institusi tidak memadai, hal ini disebabkan oleh: (1) terbatasnya jumlah SDM; (2) terbatasnya kapasitas aparat; (3) tidak adanya mekanisme yang jelas dalam pengelolaan kawasan perkotaan; (4) tidak adanya institusi khusus mengelola kawasan perkotaan dengan kewenangan memadai; (5) terbatasnya infrastruktur dan layanan perkotaan; dan (6) terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Kedua, tantangan yang terlalu besar. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan kawasan perkotaan kabupaten sangat cepat dan pertumbuhan perkotaannya terus-menerus meluas menyebabkan dalam satu kabupaten dapat memiliki banyak kawasan perkotaan.

Keberadaan kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh belum direspon baik oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada: (1) banyak permasalahan yang tidak tertangani dengan baik karena tidak memiliki pengelolaan sendiri; (2) kawasan perkotaan kabupaten cenderung tidak berkembang secara mandiri; (3) proses pembangunan tidak berjalan efektif, (4) menciptakan risiko defisit penyediaan infrastruktur maupun layanan; (5) penurunan standar hidup; (6) menciptakan kemiskinan perkotaan; dan (7) mendorong terciptanya perkampungan kumuh. Berdasar atas kondisi tersebut, maka perlu dicari alternatif agar kawasan perkotaan kabupaten memiliki kesempatan pengelolaan yang lebih baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persepsi stakeholders desa terhadap peluang pengembangan kerjasama antara desa dalam konteks pengelolaan kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh, yang menjadi permasalahan bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang tidak terungkap melalui data-data statistik. Dimana sumber informasi utama adalah hasil wawancara dari para narasumber. Isu utama yang diangkat, dalam konteks pengelolaan kawasan perkotaan kabupaten, adalah pengelolaan sampah dari lima desa perkotaan yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut para stakeholders kerjasama antar desa dalam pengelolaan sampah pada kelima desa perkotaan berpeluang untuk dilakukan. Bentuk kerjasama yang potensial untuk dikembangkan menurut para stakeholders adalah berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama. Terdapat hal-hal yang mempengaruhi kerjasama tersebut, yang dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu: (1) hal-hal yang menjadi hambatan, (2) hal-hal yang menjadi tantangan dan (3) hal-hal yang menjadi pendorong.

**Kata kunci : persepsi stakeholders, desa perkotaan, kawasan perkotaan kabupaten, kerjasama antar desa, sleman yogyakarta**